

# Penguatan Kearifan Lokal Untuk Resolusi Konflik dan Upaya Bina Damai di Pulau Seribu Masjid

Suprpto  
Dosen STAIN Mataram  
praptontb@yahoo.com

## Abstract

Identifying local traditions and wisdoms is essential in reducing conflicts and promoting peace within Muslim societies. Peaceful situation that is created from the preservation of local wisdoms within societies can store harmony and social cohesion and unity. The resolution of conflict that has been so far attempted rarely works out due to the inappropriate model taken. This paper discusses the conflict plot and critically analyses its resolution in 'Pulau Seribu Masjid' Lombok. It also observes how a number of local wisdoms, such as *sesengak*, *perteke*, and *lelakaq*, and local traditions that are well preserved can be employed to resolve the existing conflict and develop peace building.

**Kata kunci:** Lombok, kearifan lokal, perdamaian dan resolusi konflik.

## Pendahuluan

Lombok, sebuah pulau di propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dikenal dengan sebutan "pulau seribu masjid." Sebutan ini selain mengindikasikan banyaknya tempat ibadah yang ada di pulau ini juga secara sengaja merujuk adanya kenyataan bahwa Islam merupakan agama mayoritas di wilayah ini. Nuansa Islam terlihat sangat kental dalam keseluruhan aspek kehidupan masyarakat Lombok.<sup>1</sup> Banyaknya jumlah lembaga pendidikan Islam seperti madrasah dan pesantren, serta tingginya animo masyarakat untuk pergi haji adalah sebagian indikator konkrit kuatnya Islam dalam struktur budaya masyarakat Sasak. Di beberapa kawasan jalan protokol marak terpampang beragam kaligrafi berupa potongan ayat Quran atau Hadis yang secara masif dibuat oleh pemerintah kota dan kabupaten. Kehadiran Islam selama berabad-

---

<sup>1</sup>Meskipun ada varian lain di Lombok seperti Islam *Wetu Telu*, tetapi secara keseluruhan Islam telah lama dianut masyarakat Lombok. "Menjadi Sasak berarti menjadi Muslim", demikian pernyataan John Ryan Bartholomew yang mengutip peneliti sebelumnya seperti Ecklund 1981; 4 dan Judd 1980; 89. Lihat John Ryan Bartholomew, *Alif Lam Mim Kearifan Masyarakat Sasak*, terj. Imron Rasyidi (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), 86. Tentang konflik antara Islam *Wetu Telu* dan *Waktu Lima* selengkapnya lihat Erni Budiwanti, *Islam Sasak: Wetu Telu versus Waktu Lima* (Yogyakarta: LKiS, 2000); Sven Cederroth, *The Spell of The Ancestors and The Power of Mekkah, A Sasak Community on Lombok* (Goteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis, 1981).

abad di Lombok telah mengakar dalam nafas kehidupan masyarakat di pulau ini meskipun secara geografis dan kultural posisi Lombok berada dalam apitan komunitas keagamaan yang berbeda yakni Hindu di Bali dan Kristen di Nusa Tenggara Timur. Kultur Islam yang kuat ditambah keindahan alam pantai dan pegunungan yang sangat menawan menjadikan pulau ini sebagai salah satu tujuan wisata yang sangat diperhitungkan di Indonesia. Hanya saja akhir-akhir ini—setidaknya dalam satu dasawarsa terakhir—keindahan, ketenangan dan harmoni di Lombok kerap terusik oleh serangkaian konflik berbau kekerasan (*violence conflict*). Ragam dan jenis konflik bermacam-macam seperti konflik antar kampung, konflik antar dan intra agama hingga konflik akibat persoalan ekonomi dan politik.

Upaya penanganan konflik yang selama ini dilakukan oleh pemerintah maupun elit agama terkesan hanya menyelesaikan atau mengakhiri konflik dan belum mengarah pada upaya transformasi konflik secara berkesinambungan (*istimrār*). Akibatnya, meskipun konflik terlihat berhenti tetapi potensi konflik yang sama bisa saja muncul di lain waktu. Oleh karenanya yang diperlukan bukanlah penghentian konflik—apalagi jika dilakukan secara represif—tetapi manajemen konflik. Manajemen konflik merupakan upaya konstruktif yang direncanakan, diorganisasikan, digerakan dan dievaluasi secara teratur sehingga konflik tidak mengarah pada hal-hal yang merusak.<sup>2</sup>

Pada dasarnya konflik dalam masyarakat merupakan sesuatu yang *given*. Keberadaannya acap mengiringi dinamika sebuah masyarakat. Eksistensi konflik dengan demikian merupakan sesuatu yang alamiah dan wajar.<sup>3</sup> Akan tetapi ketika konflik telah mengarah pada tindak kekerasan dan anarki maka dampak positif konflik sebagai sarana kohesifitas dan soliditas sebuah grup kemudian berubah menjadi sesuatu yang destruktif.

Untuk menyikapi hal ini diperlukan sejumlah upaya mengelola konflik tersebut menjadi sebuah energi positif yang bermanfaat sebagai modal sosial. Pola penanganan konflik mestilah dicarikan model yang berbeda dari cara-cara penyelesaian konflik model *top-down*. Pola penanganan yang melibatkan partisipasi masyarakat secara luas dengan memanfaatkan kearifan lokal. Kearifan lokal adalah norma-norma sosial, tradisi-tradisi positif yang hidup di

---

<sup>2</sup>Ini merupakan pendapat Robinson dan Clifford yang dikutip oleh Alo Liliweri. Lihat Alo Liliweri, *Prasangka dan Konflik Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur* (Yogyakarta, LKiS, 2005), 288.

<sup>3</sup>Lewis Coser melihat bahwa konflik merupakan bagian dari dinamika masyarakat karenanya memberi efek positif bagi soliditas grup. Terdapat tiga argumentasi yang mendasari pendapatnya. Pertama, situasi konflik akan meningkatkan kohesi internal dari kelompok-kelompok terkait; kedua, mampu menciptakan asosiasi-asosiasi dan koalisi-koalisi baru dan ketiga, dengan konflik akan terbangun keseimbangan kekuatan antar kelompok terlibat Lihat, Lewis Coser, *The Function of Social Conflict* (New York: Free Press, 1965).

tengah masyarakat.<sup>4</sup> Untuk konteks Lombok, kearifan lokal dapat digali dari nilai-nilai budaya dan ajaran Islam sebagai agama mayoritas masyarakat. Selain menjadi alternatif resolusi konflik, kearifan lokal pada masyarakat berpenduduk mayoritas Islam—dalam banyak kajian kontemporer—ternyata juga memberi sumbangan bagi kerja bina damai nir-kekerasan.<sup>5</sup>

### **Konflik, Resolusi Konflik dan Bina Damai**

Dalam kapasitasnya sebagai makhluk individu maupun sosial, manusia jelas pernah terlibat dalam konflik. Konflik merupakan kenyataan hidup yang tidak terhindarkan dan kadang bersifat kreatif. Konflik terjadi ketika tujuan tidak sejalan atau karena kesenjangan status sosial, kurang meratanya kemakmuran dan akses yang tidak seimbang terhadap sumberdaya serta sudut pandang terhadap suatu permasalahan. Ralf Dahrendorf menyatakan bahwa konflik merupakan fenomena yang selalu hadir (*inherent omni-presence*) dalam suatu komunitas.<sup>6</sup> Pada tingkatan ini, konflik sebetulnya merupakan fenomena alamiah yang menyertai pola interaksi manusia sepanjang masa. Persoalannya adalah ketika konflik berubah menjadi kekerasan atau anarki apalagi dengan melibatkan massa dalam jumlah yang sangat banyak. Harmoni sosial yang telah terbangun biasanya akan berubah menjadi *chaos*.

Ada banyak teori yang menjelaskan tentang sebab-sebab terjadinya konflik. Salah satu di antaranya adalah yang dikemukakan oleh Simon Fisher dkk. yang menyebutkan beberapa teori tentang terjadinya konflik: Pertama, teori hubungan masyarakat, yang menyatakan bahwa konflik terjadi disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kedua, teori negosiasi konflik, yang menganggap bahwa konflik terjadi oleh posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang mengalami konflik. Ketiga, teori keutuhan manusia, yang menganggap bahwa konflik disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia—fisik, mental dan sosial—yang tidak terpenuhi atau terhalangi. Keamanan, identitas, pengakuan, partisipasi dan

---

<sup>4</sup>Kearifan lokal atau yang kerap disebut sebagai *local wisdom* dimaknai sebagai usaha manusia dengan menggunakan akal budinya untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu, objek atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu. Lihat Nurma Ali Ridwan, "Landasan Keilmuan Kearifan Lokal" *Ibda'*, Vol. 5, No. 1, Jan-Jun (2007): 27-38.

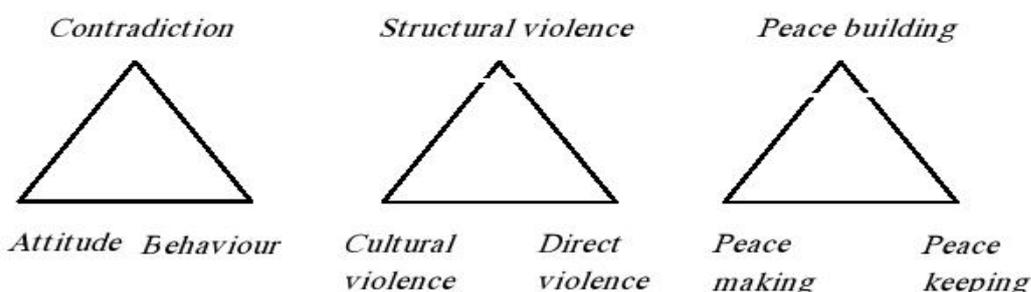
<sup>5</sup>Berbagai upaya menampilkan tradisi damai (*islāh*) di dunia Islam kontemporer mulai dilakukan banyak intelektual dan praktisi perdamaian. Misalnya Ralph H. Salmi, Cesar Adib Majul, George Kilpatrick Tanham, *Islam and Conflict Resolution: Theories and Practices* (Lanham: University Press of America, 1998); Abdul Aziz Said, Nathan C. Funk, Ayse S. Kadayifci, *Peace and Conflict Resolution in Islam: Precept and Practice* (Lanham: University Press of America, 2001); Mohammed Abu Nimer, *Non Violence and Peace Building in Islam: Theory and Practice* (Florida: University Press of Florida, 2003).

<sup>6</sup>Ralf Dahrendorf, *Class and Class Conflict in Industrial Society* (Stanford: Stanford University Press, 1959), 241 – 248.

otonomi sering merupakan inti pembicaraan. Keempat, teori identitas yang berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh karena identitas yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan di masa lalu yang tidak diselesaikan. Kelima, teori kesalahpahaman antarbudaya, yang berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh ketidakcocokan dalam cara-cara komunikasi di antara berbagai budaya yang berbeda. Keenam, teori transformasi konflik, yang menyatakan konflik disebabkan oleh ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah-masalah sosial, budaya dan ekonomi.<sup>7</sup>

Konflik kekerasan juga bisa dilihat dari perspektif konflik elit. Seperti diketahui pasca Reformasi, selain beberapa kerusuhan, kondisi sosial politik di Indonesia ditandai dua gejala yang mencolok yakni konflik politik (*political conflict*) dan kekerasan politik (*political violence*). Tarik menarik kepentingan politik elit di satu sisi dapat menyumbang proses demokratisasi, tetapi dampak buruknya dapat memunculkan pengkotak-kotakan masyarakat yang akibatnya cenderung menimbulkan kekerasan kolektif.<sup>8</sup>

Johan Galtung melihat konflik selalu melibatkan tiga hal yakni adanya *contradiction* (C) antara *attitude* (A) dan *behaviour* (B). Ia juga melihat bahwa konflik terdiri dari *structural violence*, *cultural violence* dan *direct violence*. Untuk itu Galtung menawarkan tiga model yang saling terkait, yaitu; *peace keeping*, *peace building*, *peace making*. *Peace keeping* dilakukan ketika konflik benar-benar tak bisa dihentikan secara halus. Pelibatan aparat keamanan atau militer terpaksa ditempuh guna menghentikan konflik. *Peace building* merupakan strategi yang mencoba mengembalikan keadaan destruktif akibat konflik dengan jalan membangun jembatan komunikasi antara pihak yang terlibat. Sedangkan *peace making*, adalah upaya negoisasi antara kelompok yang memiliki perbedaan pandangan dan kepentingan. Agar lebih jelas, berikut ditampilkan segitiga model Galtung tersebut:



<sup>7</sup>Simon Fisher, et al., *Mengelola Konflik Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak*, terj. S.N. Karikasari et al. (Jakarta: The British Council Responding to Conflict, tth), 4.

<sup>8</sup>Lihat Muhsin Jamil, ed., *Mengelola Konflik Membangun Damai: Teori, Strategi dan Implementasi Resolusi Konflik* (Semarang: Walisongo Mediation Centre, 2007).

### **Gambar 1. Model Galtung tentang konflik, kekerasan dan perdamaian<sup>9</sup>**

Untuk menangani konflik diperlukan upaya yang salah satunya dinamakan resolusi konflik. Resolusi konflik merupakan suatu terminologi ilmiah yang menekankan kebutuhan untuk melihat perdamaian sebagai sebuah proses terbuka dan membagi proses penyelesaian konflik melalui beberapa tahap sesuai status konflik.<sup>10</sup> Ada empat tahapan dalam resolusi konflik, yaitu: (1) Tahap de-eskalasi konflik yang menekankan pada proses penghentian kekerasan. Militer atau aparat keamanan biasanya akan melakukan pekerjaan ini. (2) Tahap negoisasi, langkah penyelesaian yang lebih berorientasi politik dengan melibatkan kelompok-kelompok yang bertikai. (3) Tahap *problem solving approach* yang lebih bernuansa sosial. (4) Tahap *peace building*, yakni tahap yang bersifat kultural dan struktural. Memerlukan waktu yang panjang dan konsistensi untuk mewujudkan perdamaian yang permanen. Rothman menjabarkan ada empat komponen utama pada tahap *problem solving approach*<sup>11</sup>. Pertama, masing-masing pihak mengakui legitimasi pihak lain untuk melakukan inisiatif komunikasi tingkat awal. Kedua, masing-masing pihak memberi informasi yang benar tentang konflik yang sedang terjadi meliputi penyebab, trauma yang timbul, hambatan struktural yang mungkin dihadapi dalam resolusi konflik. Ketiga, kedua belah mulai mencari alternatif solusi setidaknya sinyal-sinyal menuju perdamaian. Keempat, *problem solving workshop* yakni kesediaan pihak-pihak untuk menyediakan suasana kondusif bagi resolusi konflik.

Dari semua versi yang ada, satu hal yang sangat diharapkan dalam menangani konflik adalah kesediaan pihak-pihak yang memiliki otoritas agar bertindak secara obyektif dan netral. Prinsip ini perlu diambil agar pihak-pihak yang terlibat tidak ada yang merasa dirugikan dan merasa *legowo* (*satisfaction*). Selain langkah-langkah yang bersifat kuratif, tentu saja perlu dilakukan tindakan-tindakan yang bersifat preventif agar potensi konflik kekerasan dapat diantisipasi. Langkah yang disebut kedua ini lebih penting ketimbang langkah pertama. Pemerintah dan masyarakat mestinya

---

<sup>9</sup>Oliver Ramsbotham, Tom Woodhouse and Hugh Mial, *Contemporary Conflict Resolution. The Prevention, Management and Transformation of Deadly Conflicts* (Cambridge: Polity Press, 2006), 10.

<sup>10</sup>Syafuan Rozi et al., *Kekerasan Komunal: Anatomi dan Resolusi Konflik di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 21 – 22. Dengan pengertian yang agak berbeda Morton mendefinisikan resolusi konflik sebagai sekumpulan teori dan penyelidikan yang bersifat eksperimental dalam memahami sifat-sifat konflik, penyebab, dan alternatif strategi penyelesaian. Lihat Morton Deutsch, *The Resolution of Conflict* (New Haven: Yale University Press, 1973), 420.

<sup>11</sup>J. Rothman, *From Confrontation to Cooperation: Resolving Ethnic and Regional Conflict* (Newbury Park, CA: Sage, 1992), 30.

mengembangkan pencegahan dari pada menunggu konflik muncul ke permukaan. Upaya-upaya pencegahan merupakan bagian dari upaya bina damai secara berkelanjutan.

Terkait dengan konflik yang kerap terjadi, elit agama memiliki peran penting terutama pada konflik bernuansa agama. Otoritas keilmuan keagamaan yang tidak dimiliki oleh elit pemerintah menjadikan elit agama sebagai “penyelesai akhir” dari sebuah konflik yang terjadi. Di sinilah persoalan kadangkala menjadi rumit. Penanganan konflik yang melibatkan unsur agama biasanya relatif lebih susah dan berlarut-larut. Apalagi jika para pemimpin agama kurang bertindak netral. Alih-alih melakukan mediasi antara dua belah pihak yang bersengketa sehingga elit agama benar-benar menjadi solusi atas masalah, kehadirannya justru memperkeruh suasana atau menjadi bagian dari masalah.

Pernyataan terakhir memang bernada skeptis. Mana mungkin seorang pemimpin agama yang semestinya membawa pesan perdamaian tetapi justru menjadi “provokator”? Dari berbagai konflik yang acap muncul di berbagai daerah, eskalasi konflik bisa bertambah manakala ada *support*—paling tidak pembiaran—dari sebagian elit yang karena kesalahan memahami persoalan membiarkan umat melakukan kekerasan. Dari latar perkembangan konflik, terutama konflik bernuansa agama, setidaknya ada tiga faktor yang melingkupi, yaitu; *historical setting*, *cultural setting* dan *political conditioning*.<sup>12</sup> Melalui *historical setting*, kita dapat memahami bahwa sejarah agama umumnya merupakan kronologi iman di tengah konflik sistematis antara mereka yang percaya *the true believer* dan *the unbeliever* secara hitam putih. Di sini pilihannya jelas, menyebarkan firman Tuhan atau berjuang hingga mati menjadi “syahid”.

Melalui *cultural setting*, pola keberagamaan masyarakat dapat dilihat sebagai sebuah proses menyuburkan kultur paternalistik. Anggapan bahwa perilaku keagamaan yang diperankan para elit lebih tinggi daripada ketaatan orang awam, seringkali menggiring seseorang untuk mengikuti apa saja kata elit agama. Sikap paternalistik ini konon memiliki akar historis yang kuat. Para raja tempo dulu sering tampil menjadi penentu sikap keberagamaan rakyatnya.

Sementara melalui *political conditioning*, agama rawan dimanipulasi untuk kepentingan politik (*political interest*). Demi mencapai keinginan politik kekuasaan, seseorang atau sekelompok orang tanpa disadari kerap membawa-bawa agama untuk membenarkan tindakan yang menguntungkan kelompoknya.

---

<sup>12</sup>Nur Achmad, ed., *Pluralitas Agama: Kerukunan dalam Keragaman* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001), 100-101.

Posisi elit, baik pemerintah maupun elit agama, dengan demikian memegang posisi kunci dalam menciptakan rasa damai di masyarakat. Pada masyarakat dengan kultur paternalistik yang masih tinggi keberadaan elit kerap menjadi contoh bagi masyarakat pada level di bawahnya. Perilaku, sikap dan pemikiran para elit yang inklusif akan sangat membantu terciptanya keharmonisan masyarakat. Sebaliknya jika para elit menampilkan diri sebagai sosok yang eksklusif, maka masyarakat juga cenderung tertutup.

### **Kearifan Lokal untuk Resolusi Konflik dan Bina Damai**

Dalam menyelesaikan konflik, ada kecenderungan masyarakat untuk menerapkan model penyelesaian yang datang dari luar tanpa ada improvisasi dengan kondisi lokal. Diawali dengan penghentian konflik melalui cara-cara memaksa oleh pihak keamanan (*peace keeping*) kemudian dilanjutkan dengan penetapan serangkaian aturan termasuk sanksi bagi kedua belah pihak agar tidak mengulangi konflik. Pola semacam ini biasanya hanya efektif untuk menghentikan konflik kekerasan dalam waktu singkat tetapi kurang bisa menjamin bahwa konflik tidak akan muncul lagi di kemudian hari. Proses penyelesaian berlangsung secara *ad hoc* dan parsial kurang menyentuh akar persoalan konflik yang sebenarnya.

Kelemahan model penyelesaian seperti di atas, selain hanya bersifat sementara yang kurang dapat menjamin penghentian konflik secara permanen, juga kerap mengabaikan rasa keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Dengan model yang memaksa, jelas tidak bisa menghilangkan rasa dendam diantara pihak-pihak yang terlibat (*disputants*). Para elit yang bertugas menjadi penyelesai konflik, yang karena berkeinginan untuk segera mengakhiri konflik-cenderung memihak kepada mereka yang kuat. Alih-alih menjadi mediator yang mesti bertindak netral dan adil, elit kerap terjebak mengikuti kemauan kelompok mayoritas.<sup>13</sup> Akibatnya, acap terjadi apa yang disebut *victimizing victim* (mengorbankan korban). Korban yang hendak mencari keadilan malah digiring menjadi kelompok yang harus mengalah dan dipaksa mengikuti kehendak kelompok *mainstream*.

Sesuai dengan jenis, bentuk dan dinamika konflik, pola manajemen konflik sebetulnya juga sangat beragam. Kemampuan para elit untuk memilih cara-cara yang tepat dengan melibatkan berbagai pendekatan politik, ekonomi dan sosial secara komprehensif akan membantu mengurai konflik secara tuntas.

---

<sup>13</sup>Jika dirunut, ketidaknetralan elit bahkan menjadi tren bagi elit negara. Berlarut-larutnya penyelesaian kekerasan yang menimpa warga Ahmadiyah misalnya, diakibatkan oleh negara yang sering absen dan bahkan menyokong kekerasan dan tindak intoleransi dari sebagian warga. Lihat Nicola Colbran, "Realities and Challenges in realising freedom of Religion or belief in Indonesia" *The International Journal of Human Rights*, Vol. 14, No. 5 (September 2010): 678 – 704.

Salah satu domain penting tetapi luput dari perhatian para elit dalam penanganan konflik adalah melalui pendekatan “dari dalam” masyarakat sendiri. Masyarakat sebetulnya memiliki kemampuan dan sensitivitas yang disebut “kearifan lokal” dalam menjaga kelangsungan dinamika masyarakat termasuk mengantisipasi bahaya yang mengancam dan menyelesaikan konflik. Memberdayakan kearifan lokal sebagai alternatif solusi dalam penanganan konflik merupakan pendekatan budaya dalam menyelesaikan konflik.

Kearifan lokal, menurut John Haba sebagaimana dikutip oleh Irwan Abdullah,<sup>14</sup> “mengacu pada berbagai kekayaan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam sebuah masyarakat dikenal, dipercayai dan diakui sebagai elemen-elemen penting yang mampu mempertebal kohesi sosial di antara warga masyarakat.” Setidaknya ada enam signifikansi dan fungsi kearifan lokal jika dimanfaatkan dalam resolusi konflik. Pertama, sebagai penanda identitas sebuah komunitas. Kedua, elemen perekat (aspek kohesif) lintas warga, lintas agama dan lintas kepercayaan. Ketiga, kearifan lokal tidak bersifat memaksa tetapi lebih merupakan kesadaran dari dalam. Keempat, kearifan lokal memberi warna kebersamaan sebuah komunitas. Kelima, kemampuan *local wisdom* dalam mengubah pola pikir dan hubungan timbal balik individu dan kelompok dan meletakkannya di atas *commonground*. Keenam, kearifan lokal dapat mendorong proses apresiasi, partisipasi sekaligus meminimalisir anasir yang merusak solidaritas dan integrasi komunitas.

Rekomendasi perlunya melibatkan “orang dalam” melalui kearifan lokal sebagai alternatif resolusi konflik sebetulnya bisa digunakan untuk kasus-kasus konflik bernuansa agama. Meskipun agama masih diperdebatkan sebagai unsur budaya atau bukan dalam konstruksi sosial masyarakat, tetapi fakta historis memperlihatkan bahwa proses integrasi dan harmoni di antara keyakinan yang berbeda yang pernah hidup di Indonesia dapat berlangsung justru karena kontribusi kearifan lokal dalam merawat dan mengelola perbedaan tersebut.<sup>15</sup>

Hanya saja, berbagai kearifan lokal yang mungkin dikembangkan di negeri ini masih saja membutuhkan apresiasi dan penguatan dari para elit agar

---

<sup>14</sup>Irwan Abdullah, et al., ed., *Agama dan Kearifan Lokal dalam Tantangan Global* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 27.

<sup>15</sup>Berbagai penelitian menunjukkan akan efektifitas kearifan lokal dalam merawat pluralitas beragama. Penelitian yang dilakukan Suprpto dkk., tentang harmoni sosial antara pemeluk agama Kristen dan Islam yang terjadi di masyarakat Donggo, Kabupaten Bima dilatarbelakangi oleh adanya kesamaan tradisi leluhur. Selengkapnya baca, Suprpto, Kadri dan Abdul Wahid, “Satu Leluhur Dua Agama,” *Laporan penelitian Lemlit IAIN Mataram tahun 2009*. Demikian juga kerukunan yang terjalin antara warga Muslim dan Kristen yang ada di Klepu Ponorogo juga disatukan oleh kearifan Lokal setempat. Lihat, Marwan Sholahuddin, “Mengenal Kearifan Lokal di Klepu Ponorogo: Praktik Hubungan Sosial Lintas Agama dan Mekanisme Pencegahan Konflik” dalam Irwan Abdullah, et al., ed., *Agama dan Kearifan Lokal dalam Tantangan Global* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 13-48.

kearifan lokal ini bekerja (*workable*) secara baik. Para pemimpin tradisional adalah penggerak yang menentukan harmoni sosial pada suatu komunitas. Sebuah penelitian yang dirilis di tahun 2008, menunjukkan bahwa dalam masyarakat tradisional, meskipun sebuah komunitas telah memiliki mekanisme penyelesaian konflik sendiri, seperti tradisi *Pelagandong* di Sulawesi, tetapi tanpa inisiasi dari para pemimpin dan tokoh setempat, kearifan lokal ini tidak berfungsi secara maksimal.

### Konflik di Lombok dan Pola Penanganan

Konflik kekerasan yang terjadi di Lombok kerap melibatkan massa dalam jumlah yang tak sedikit. Pertentangan individu kerap merembet menjadi konflik komunal dengan frekuensi dan intensitas konflik yang tinggi. Beberapa konflik yang terjadi dalam dua dekade terakhir bisa dikelompokkan dalam beberapa kategori seperti: konflik keagamaan, konflik antar kampung, konflik politik dan ekonomi, serta konflik budaya. Tabel berikut secara singkat akan menampilkan sebaran konflik di Lombok yang terjadi dalam dua dekade terakhir.

Kategori	Bentuk	Lokasi	Penyebab
Konflik Keagamaan	Ahmadiyah dengan warga masyarakat	Lombok Timur, Lombok Barat	Keyakinan Ahmadiyah yang menganggap Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi dianggap menodai agama Islam.
	Salafiyah dengan warga masyarakat	Lombok Barat, Lombok Tengah dan Lombok Timur	Kritik Salafi atas tradisi keberagaman masyarakat Lombok yang dianggap <i>bid'ah</i> (heterodoks), jauh dari kemurnian Islam.
	Warga Desa Grunung Praya dengan Tarekat Siratal Mustaqim	Lombok Tengah	Penyimpangan terhadap akidah Islam dan dugaan isu mesum yang dilakukan pimpinan tarekat terhadap beberapa pengikut.
	“NW Pancor” dengan “NW Anjani”	Lombok Timur	Dualisme kepengurusan pasca Muktamar Praya. Masing-masing kelompok

			mengklaim diri sebagai pewaris yang sah pendiri NW. Konflik politis antar elit merembet hingga akar rumput. Terdapat friksi yang kuat pada jamaah NW.
	Kasus "171" (Kerusuhan 17-1-2000)	Mataram	Respons terhadap konflik keagamaan di Maluku dan Ambon setelah massa mengikuti tablig akbar di lapangan umum kota Mataram.
	Ketegangan Hindu Muslim	Mataram	Miskomunikasi antara kedua komunitas. Konflik bisa bermula dari perkelahian antar pemuda kemudian melibatkan warga kampung.
Konflik Antar kampung	Bentrok antar kampung antara warga desa seperti: Karang Genteng dan Patemon, Karang Genteng dengan Pagutan Presak	Mataram  Mataram	Tidak dapat diketahui secara pasti penyebabnya karena konflik terus berulang. Konflik telah mulai sejak tahun 1988. Korban yang jatuh di salah satu pihak menyebabkan dendam yang sulit diurai. Sebagian pihak menyatakan perebutan lokasi makam akibat pemekaran wilayah perkotaan tahun 1978.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketara dengan Penunjak</li> <li>• Ketara dengan Batujai</li> <li>• Ketara dengan Sengkol</li> </ul>	Lombok Tengah	Biasanya pemicunya berupa hal-hal sepele seperti perkelahian remaja yang kemudian diikuti dengan perkelahian antar kampung. Konflik komunal acap terjadi hampir tiap tahun dan hingga kini masih sering terulang.

	• Ketara dengan Tenandon		
Ekonomi dan Politik	Konflik pembangunan Bandara Internasional Lombok (BIL)	Lombok Tengah	Pembebasan lahan milik petani oleh pihak Angkasa Pura yang dianggap tidak adil. Masyarakat menolak biaya ganti rugi tanah yang dianggap terlalu kecil.
	PNS dengan Pemda Lombok Timur	Lombok Timur	Penolakan masyarakat atas kebijakan pembayaran zakat bagi PNS kepada Bazda Lotim melalui Perda no 9 tahun 2002.

**Tabel 1. Sebaran Konflik di Lombok<sup>16</sup>**

Penjelasan secara sekilas tentang beberapa konflik berskala besar yang terjadi di Lombok sebagaimana tergambar dalam tabel di atas dapat dibaca pada paparan berikut ini.

Di awal tahun 2000, konflik bernuansa agama meletus di Lombok. Konflik ini bermula dari kegiatan tablig akbar di lapangan umum kota Mataram yang digagas sejumlah ormas Islam Lombok yang dimaksudkan sebagai bentuk solidaritas umat Muslim NTB terhadap sesama Muslim di Maluku dan Ambon yang kala itu sedang konflik dengan Kristen. Para penceramah yang tidak hanya datang dari Tuan Guru di Lombok tetapi juga dari luar kota Mataram menghimbau agar umat Islam memberi simpati dan dukungan terhadap saudara-saudara Muslim yang sedang "dizalimi" di Maluku dan Ambon. Usai kegiatan tablig akbar, jamaah pengajian yang telah terbakar emosinya kemudian bergerak menuju beberapa gereja dan melakukan penyerangan dan pembakaran.<sup>17</sup> Aktifitas berikutnya diikuti dengan *sweeping* beberapa rumah orang Cina dan melakukan perusakan. Sejumlah gereja terbakar dan banyak warga Tionghoa terpaksa harus eksodus dari Mataram.

Konflik organisasi keagamaan juga terjadi di Lombok yakni konflik di tubuh Nahdlatul Wathan (NW), sebuah organisasi keagamaan terbesar di propinsi NTB. Konflik terjadi karena adanya perpecahan di tubuh NW yang

<sup>16</sup>Diolah dari berbagai sumber.

<sup>17</sup>Jacques Bertrand, *Nationalism and Ethnic Conflict in Indonesia* (New York: Cambridge University Press, 2004), 132.

kemudian menghasilkan dua kepengurusan di tubuh NW, yakni NW Anjani (para pengurus berpusat di desa Anjani) yang dipimpin oleh Hj. Raehanun dan NW Pancor (berpusat di Pancor) yang dipimpin oleh Rahun. Kedua tokoh ini adalah putri TGKH Muhammad Zaenuddin Abdul Majid yang merupakan pendiri Nahdlatul Wathan. Konflik kedua kubu ini berlangsung cukup lama dan di tingkat *grass root* konflik ini sampai memakan korban jiwa. Namun yang menggembirakan, sekarang ini kedua kubu di bawah inisiasi Gubernur NTB, Muhamad Zainul Majdi (Tuan Guru Bajang), yang *nota bene* merupakan cucu dari Maulana Syaikh pendiri NW sedang mengupayakan *islah* (perdamaian).

Kasus konflik yang kerap berulang dan hingga kini belum memperoleh penyelesaian secara tuntas adalah kasus penyerangan Jemaat Ahmadiyah. Sebagaimana konflik yang terjadi di daerah lain seperti di Parung Bogor, konflik yang melibatkan warga dengan Ahmadiyah juga sering terjadi di pulau Lombok. Hingga kini warga Ahmadiyah yang menjadi korban masih mengungsi di Wisma Transito Mataram. Selama tiga tahun lebih mereka menghuni wisma penampungan yang kurang layak huni mendorong mereka kembali ke rumah di Ketapang Lombok Barat. Akan tetapi sesampai di rumah mereka, massa kembali merusak rumah yang telah lama mereka tinggalkan. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 26 Nopember 2010. Hingga saat ini nasib warga Ahmadiyah masih belum jelas. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat memberi solusi berupa ‘transmigrasi’ bagi warga Ahmadi ke pulau tersendiri. Namun, tawaran ini ditolak oleh sejumlah warga mengingat langkah ini hanya akan mengisolasi mereka.

Kekerasan tidak hanya menimpa mereka yang dianggap menyimpang (heterodoks), seperti Ahmadiyah, sebagian anggota masyarakat juga menyerang anggota kelompok Salafi. Kelompok keagamaan yang menekankan pada kegiatan purifikasi agama ini telah beberapa kali mendapatkan resistensi dari masyarakat. Tercatat kekerasan terjadi beberapa kali di sejumlah tempat seperti di Gelogor kecamatan Sekotong Tengah, di dusun Beroro desa Jembatan Kembar kecamatan Lembar, desa Sesela kecamatan Gunung Sari dan di dusun Mesanggok desa Gapuk kecamatan Gerung semuanya di wilayah Kabupaten Lombok Barat.<sup>18</sup> Selain itu sebelumnya kekerasan juga terjadi terhadap pengikut aliran Wahabi di kecamatan Masbagik Lombok Timur.

Pola penanganan konflik biasanya dilakukan dengan penerjunan sejumlah aparat kepolisian dibantu anggota TNI dari KORAMIL. Selanjutnya aparat keamanan bersama perwakilan pemerintah daerah dan sejumlah tokoh agama memanggil para pihak yang bertikai untuk melakukan dialog dan mencapai

---

<sup>18</sup>Faizah, “Dakwah Salafiyah di Lombok: Suatu Kajian Komunikasi antar Budaya,” disertasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010, 185.

kesepakatan agar konflik dihentikan. Langkah *peace keeping* semacam ini untuk menjaga agar kekerasan berhenti dan korban di kedua belah pihak tidak terus berlanjut. Proses penyelidikan dan penindakan terhadap mereka yang menjadi pelaku biasanya tidak diteruskan secara tuntas. Sehingga, proses penegakan hukum harus berhenti. Untuk sementara waktu pola semacam ini efektif, tetapi tidak menjamin bahwa konflik tidak akan terjadi lagi. Buktinya, beberapa tahun berikutnya konflik yang sama kembali terulang.

### **Mempertimbangkan Kearifan Lokal Masyarakat Sasak**

Munculnya berbagai konflik kekerasan di bumi Lombok pada tahun-tahun terakhir sangat mengejutkan banyak pihak. Mengingat secara sosiologis sebetulnya masyarakat Lombok terkenal sebagai masyarakat yang lebih mementingkan harmoni ketimbang konflik. Berbagai tradisi yang pernah dan masih hidup (*living tradition*) di masyarakat—sebagaimana tergambar dalam tabel berikut—menunjukkan bahwa orientasi pada keharmonisan adalah hal utama masyarakat Sasak.

<b>Tradisi</b>	<b>Makna</b>	<b>Deskripsi Kegiatan</b>
<i>Saling jot</i>	Memberi atau mengantar makanan	Setiap keluarga yang usai <i>begawe</i> ( <i>hajatan</i> ) mengantarkan makanan ke pada saudara atau tetangga. Tradisi ini sebagai bentuk persahabatan meskipun berlainan agama. Contoh jika orang Hindu atau Nasrani selesai merayakan Galungan atau Natalan, mereka mengantarkan kue kering kepada tetangga yang Muslim.
<i>Saling pesilaq</i>	Saling mengundang	Kegiatan saling mengundang untuk menghadiri hajatan. Apabila umat Hindu mengundang umat Islam, biasanya pihak Hindu telah menyediakan makanan mentah agar saudara Muslim bisa memasaknya sendiri. Demikian juga dengan tempat menghidangkan makanan juga disediakan secara khusus.
<i>Saling pelangarin</i>	Saling melayat/ <i>ta'ziah</i>	Jika ada tetangga yang meninggal apapun agamanya, semua warga datang melayat. Jika yang meninggal warga non Muslim, biasanya umat Islam hanya datang sampai rumah duka tetapi tidak dilarang jika

		ingin sampai ke pemakaman Hindu ( <i>seme</i> ).
<i>Saling ayoin/saling jangkok</i>	Saling mengunjungi	Kebiasaan bertandang (silaturahmi) kepada keluarga dan tetangga. Jika umat Islam berkunjung ke tetangga Hindu, biasanya sang tuan rumah hanya menghadirkan jajan bukan nasi yang ada lauknya. Jika harus nasi, maka biasanya <i>batur</i> Hindu akan membelikannya di warung milik Muslim.
<i>Saling ajinan</i>	Saling menghormati tradisi	Apabila ada rombongan pengantin yang diiringi gamelan melewati komunitas Hindu Bali, maka orang-orang Islam hanya menabuh gamelan tanpa ada teriakan, nyanyian atau tepukan. Demikian halnya jika orang Bali mengadakan ritual yang ada gamelannya seperti <i>ngaben</i> atau <i>pejagraja</i> kemudian melewati perkampungan Muslim, maka seketika gamelan dihentikan.

**Tabel 2. Tradisi Pembentuk Harmoni Masyarakat Sasak<sup>19</sup>**

Berbagai *living tradition* seperti tergambar di atas merupakan norma-norma timbal balik (*reciprocity*) antar anggota masyarakat. Dalam perspektif Putnam,<sup>20</sup> norma timbal balik seperti ini merupakan salah satu unsur modal sosial di samping dua unsur yang lain yakni sikap saling percaya antar warga (*interpersonal trust*) dan adanya jaringan kekerabatan antar warga (*civic engagement*) yang ketiganya saling berkelindan.

Sikap percaya di antara warga (*interpersonal trust*) memunculkan sikap rela membantu tetangga yang sedang mempunyai hajat atau *begawe* yang di dalamnya biasanya diselenggarakan *rowah* (pesta). Dalam banyak kesempatan seperti upacara kelahiran, pernikahan hingga kematian serta aktifitas perayaan hari besar keagamaan seperti Maulid Nabi, Isra' Mi'raj, dan lain-lain, sebuah keluarga biasanya memasak makanan dan mengundang tetangga, teman, sanak saudara untuk makan bersama. Mereka secara kekeluargaan melakukannya

<sup>19</sup>Diolah dari Djalaludin Arzaki et al, *Nilai-nilai Agama dan Kearifan Budaya Lokal Suku Bangsa Sasak dalam Pluralisme Kehidupan Masyarakat* (Mataram: Pokja Redam NTB, 2001), 26-31.

<sup>20</sup>Putnam, Robert D., *Making Democracy Work: Civic Tradition in Modern Italy* (Princeton: Princeton University Press, 1993), 167.

dengan cara duduk bersila melingkar dan bersama-sama menyantap makanan yang dihidangkan. Aktifitas ini biasanya disebut *begibung* (*megibung*). Dalam *begibung*, semua orang duduk sejajar tanpa dibedakan status sosialnya. Mereka membaur menjadi satu dan dalam suasana penuh kekeluargaan. Meskipun sejumlah orang tokoh seperti tuan guru dan kyai biasanya memperoleh hidangan lebih awal ketimbang warga yang lain tetapi secara keseluruhan posisi mereka dalam proses *begibung* adalah sama. Menyantap makanan tanpa menggunakan sendok (Jawa: *muluk*), semua orang merasakan menu masakan yang sama sambil bercengkerama secara lepas. Tradisi ini jelas menggambarkan adanya kerukunan dan harmoni di antara warga. Semangat menjalin silaturahmi sangat kental dalam kegiatan ini.

Praktik *rowah* ini sama dengan tradisi *slametan* dalam komunitas Jawa.<sup>21</sup> Pada saat *rowah* yang di dalamnya terdapat *begibung* juga berlangsung dalam banyak siklus. Seperti dalam kegiatan mendoakan keluarga yang meninggal meliputi sejumlah siklus seperti, *nelung* (tiga hari), *mitu'* (tujuh hari), *nyiwa'* (sembilan hari), *metang dasa* (empat puluh hari), *nyatus* (seratus hari), *nanun* (lima ratus hari), *nyangga* (sembilan ratus hari), *nyiu* (seribu hari). Namun pada saat ini aktifitas selamatan biasanya hanya sampai *nyatus* (seratus hari).<sup>22</sup>

Jika keluarga mempunyai hajat (*begawe*) maka warga dengan sukarela akan membantunya. Mulai dari menyumbang kebutuhan bahan mentah yang diperlukan, seorang laki-laki biasanya membawa kelapa sekaligus memecahnya di tempat keluarga yang punya hajat dengan parang yang dibawa dari rumah hingga menyiapkan semua perlengkapan dan sarana yang diperlukan. Sedangkan para wanita dengan sukarela membantu memasak makanan dan menghidangkannya. Semua ini dilakukan warga terhadap semua orang yang mempunyai hajat, meskipun orang tersebut merupakan pendatang baru.

Untuk konteks *civic engagement*, beberapa kegiatan warga Lombok dapat dilihat dalam sejumlah *pekraman* (paguyuban). Beberapa bentuk krama yang ada pada masyarakat Sasak misalnya; *krama banjar* (yakni perkumpulan antar warga yang anggotanya berasal dari beberapa dusun), *krama gubuk* (perkumpulan setingkat kampung atau dusun) dan *krama desa* (perkumpulan setingkat desa). Di dalam setiap *krama* terdapat beberapa perkumpulan sesuai kepentingan anggota *krama*. Sebagai contoh dalam *krama banjar* terdapat

---

<sup>21</sup>*Slametan* dalam tradisi masyarakat Jawa sebagaimana ditemukan Geertz di daerah penelitiannya, Mojokuto merupakan tradisi bagi masyarakat Jawa yang selalu di ulang dan berlangsung untuk banyak siklus. Seperti siklus kelahiran, tradisi *slametan* meliputi: *telonan*, *tingkeban*, *babaran*, *sepasaran*, *selapanan*, *piton-piton* dan *setahunan*. Baca Marwan Sholahuddin, "Mengetahui Kearifan Lokal di Klepu Ponorogo: Praktik Hubungan Sosial Lintas Agama dan Mekanisme Pencegahan Konflik" dalam Irwan Abdullah, et al., ed., *Agama dan Kearifan Lokal dalam Tantangan Global* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 13-48.

<sup>22</sup>Faizah, *Dakwah Salafiyah di Lombok*, 146.

*krama banjar subak* (perkumpulan para petani penggarap sawah), *krama banjar merariq* (perkumpulan para pemuda untuk kegiatan perkawinan), *krama banjar mate* (perkumpulan untuk membantu keluarga yang meninggal), *krama banjar haji* (perkumpulan untuk membantu anggota yang hendak pergi haji).

Selain itu, sejumlah nilai lokal sejatinya dapat dikembangkan sebagai upaya mengelola konflik dan membangun harmoni. Nilai-nilai kearifan lokal bisa dilacak dari naskah kuno Kotaragama: *sesenggak* (peribahasa), *perteke*, atau *lelakaq* (pantun).<sup>23</sup> Contoh ungkapan dalam naskah kuno Kotaragama misalnya *danta, danti, kusuma warsa* yang berarti kata dan janji wajib dipegang dan dipertahankan dengan kukuh. Ini berarti tuntutan bagi setiap orang untuk menyatukan antara kata dan tindakan. Ungkapan *sesenggak* misalnya *besual cara anak kemidi* (bertengkar ala anak yang sedang bersandiwara). Ungkapan ini dinasihatkan dalam kegiatan musyawarah (Sasak: *gudem*). Dalam musyawarah jika Anda berdebat hendaknya tidak seperti orang yang sungguh-sungguh bertengkar. Jika sudah usai berbeda pendapat, hendaknya tidak menyimpan dendam. Untuk pantun (*lelekaq*) terdapat peribahasa *anak kaoq mondong jagung, sai tao jari agung* yang artinya setiap orang mempunyai peluang yang sama tanpa melihat status sosial. Serta masih banyak lagi ungkapan sejenis yang bertujuan memberi rambu-rambu atau norma bagi warga masyarakat agar mampu bersosialisasi secara baik.<sup>24</sup>

Secara praktis petuah-petuah lama juga acap disampaikan untuk memberi semacam norma bagi penyelesaian sengketa di antara warga. Seperti ungkapan “*ngales marak penjalin cacing*” (bersikap lentur seperti rotan). Maksudnya jika ada perselisihan, maka setiap pihak diharapkan tidak kaku tetapi bersikap fleksibel. Sedangkan kalau suatu perkara telah sama-sama disepakati, maka setiap pihak yang berperkar diharapkan “*kendek kedek jukung belabu*” (jangan menggoyang-goyang perahu yang sedang berlabuh). Jadi setiap pihak diharapkan tidak merusak ketenangan yang telah dibangun. Oleh karena itu, prinsip berikutnya adalah “*aiq meneng, tunjung tilah, empak bau*” (air tetap jernih, teratai tetap utuh dan ikan pun didapat). Maksudnya, dalam menyelesaikan persoalan di masyarakat setiap pihak mestilah menggunakan cara-cara damai tanpa merusak persahabatan. Prinsip penyelesaian sengketa yang dikembangkan masyarakat Sasak ini, dalam teknik negoisasi modern dikenal dengan prinsip *win-win solution* bukan *win lose* apalagi *zero sum game*.

Di samping hal di atas, terdapat sejumlah idiom yang dikenal di lingkungan masyarakat Sasak sangat dekat dengan orientasi kedamaian.

---

<sup>23</sup>H.L. Syapruddin, “Nilai-Nilai Kearifan Lokal yang Berlaku pada Masyarakat Sasak Sebagai Pola Budaya”, makalah disampaikan pada *Seminar Budaya* di Taman Budaya Mataram.

<sup>24</sup>Dikutip dari H.L. Syapruddin, “Nilai-Nilai Kearifan Lokal yang Berlaku pada Masyarakat Sasak Sebagai Pola Budaya.”

Konsep *ajinin*, yang secara harfiah berarti saling menghormati, dan *reme, rapah, regen* yang berarti suka memberi, memilih situasi aman damai dan mendukung toleransi, menambah khazanah kearifan lokal masyarakat Lombok dalam menjalani relasi sosial.<sup>25</sup> Tradisi-tradisi positif lain dalam perdagangan misalnya konsep *saling peliwat* (saling membantu manakala ada tetangga atau saudara yang pailit), *saling liliq* (saling membantu jika saudara mempunyai hutang), *saling sangkul* (membantu keluarga dan tetangga yang terkena musibah) dan lain-lain.

Di luar falsafah hidup yang dapat digali dari kearifan lokal ini, sejumlah desa di Lombok terdapat pula sejumlah aturan yang disepakati bersama oleh anggota masyarakat dan menjadi semacam hukum tak tertulis. Aturan yang disepakati bersama ini dinamakan *awig-awig*. Sanksi sosial yang ditetapkan dalam *awig-awig* akan sangat efektif dibanding dengan peraturan yang berlaku dalam hukum formal. Partisipasi masyarakat dalam merumuskan *awig-awig* mendorong semua anggota merasa memiliki komitmen moral untuk menegakkannya.

Berbagai kearifan lokal masyarakat Sasak yang tertera di atas memang bukan satu-satunya kegiatan resolusi konflik. Tradisi masyarakat tersebut hanyalah salah satu bagian *peace building* pada aspek kultural. Kearifan lokal ini lebih tepat disebut modal sosial yang mampu menjadi perekat dan penjaga harmoni masyarakat. Hal penting yang diperlukan adalah kesediaan dari para elit, baik elit agama (tuan guru, kyai), elit pemerintah dan elit adat untuk duduk bersama mengembangkan pola bina damai berbasis kearifan lokal tersebut. Kesediaan para elit terhadap prakarsa bina damai ini penting mengingat meskipun sebuah daerah telah memiliki serangkaian nilai-nilai lokal dan mekanisme resolusi konflik, tetapi semuanya akan sulit berjalan tanpa keterlibatan elit secara aktif. Untuk itu, diperlukan penguatan di tingkat elit agar nilai-nilai kearifan lokal dapat dikembangkan menjadi bagian dari upaya resolusi konflik dan prakarsa perdamaian di masa depan. Potensi ini sangat mungkin dikembangkan tanpa harus bertabrakan dengan kaidah-kaidah Islam sebagai agama mayoritas masyarakat Lombok. Karena dalam Islam sendiri konsep semisal adat kebiasaan yang baik (*'urf*) atau *al-'ādah al-ma'rifah* merupakan konsep yang bisa diterima. Nilai-nilai lokal tidak harus diganti dengan istilah-istilah Islam (baca: Arab), karena sejatinya nilai-nilai lokal masyarakat Lombok telah dinaungi dengan ajaran luhur Islam.

---

<sup>25</sup>“Keragaman Budaya”, diunduh dari [http://www.budpar.go.id/filedata/5199\\_1443-5](http://www.budpar.go.id/filedata/5199_1443-5). ‘Keragaman Budaya’, pada 5 Desember 2010.

Pilihan penguatan kearifan lokal dapat dilakukan dengan banyak cara sesuai kultur lokal sehingga tidak tercerabut dari akarnya.<sup>26</sup> Mulai dari kegiatan *sangkep* (pertemuan, seminar), *gundem* (musyawarah), hingga pelatihan (*training*), yang difasilitasi oleh pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli akan hal ini. Selebihnya dalam bidang pendidikan baik formal (sekolah, madrasah) maupun non-formal (pesantren), pengembangan kurikulum muatan lokal hendaknya memperhatikan kearifan lokal ini. Sebagaimana watak dari kearifan lokal sendiri yang merupakan sendimentasi dari proses dinamika masyarakat dalam kurun waktu yang lama. Maka eksistensinya akan sangat tergantung dari kesediaan para aktor lokal dalam merawat dan mentransmisikan nilai-nilai tersebut dari generasi ke generasi.

## **Penutup**

Penguatan kearifan lokal dalam resolusi konflik dan upaya membangun bina damai nir-kekerasan merupakan satu hal yang *urgen*. Pelibatan kearifan lokal dalam resolusi konflik dan bina damai, memang bukan merupakan satu-satunya cara. Beberapa tahapan resolusi konflik mesti juga dilalui sesuai dengan tahapan dan eskalasi konflik. Penekanannya adalah bahwa pola-pola penanganan konflik yang masih sebatas penghentian konflik perlu ditingkatkan ke arah kerja bina damai (*peace building*) dengan melibatkan kearifan lokal yang telah terbukti mampu menjaga harmoni sosial masyarakat. Pemanfaatan kearifan masyarakat terbukti efektif mengingat aturan-aturan dan norma-norma ini telah lama terinternalisasi di masyarakat sehingga penghargaan dan penerimaan sebuah keputusan akan bertahan lama. Karena sejatinya apa yang muncul dari hasil kesepakatan tersebut merupakan representasi keinginan masyarakat secara luas.

Tentu saja pilihan penguatan kearifan lokal seperti di atas hendaknya diikuti oleh serangkaian upaya pemerintah untuk memenuhi berbagai kebutuhan rakyat yang mendasar, misalnya pengentasan kemiskinan, penegakan keadilan, pelestarian lingkungan alam, perbaikan kesehatan, penyediaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas pendidikan rakyat.

---

<sup>26</sup>Terdapat sebuah tradisi lokal masyarakat Lombok berupa pertunjukan seni budaya yang dapat dianggap sebagai upaya mentransmisikan nilai-nilai lokal sekaligus mempertahankan tradisi daerah. Salah satunya adalah seni teater tradisional yang bernama "*Cupak Gurantang*". *Cupak* yang dipersonifikasikan sebagai tokoh jahat, culas, egois dan maunya menang sendiri. Sementara *Gurantang* adalah tokoh yang baik, memiliki sifat terpuji seperti suka menolong, mementingkan harmoni dan bekerja tanpa pamrih.

### Daftar Pustaka

- Abdullah, Irwan et al., ed. *Agama dan Kearifan Lokal dalam Tantangan Global*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Abu Nimer, Mohammed. *Non Violence and Peace Building in Islam: Theory and Practice*. Florida: University Press of Florida, 2003.
- Achmad, Nur, ed. *Pluralitas Agama: Kerukunan dalam Keragaman*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001.
- Arzaki, Djalaludin, et al. *Nilai-nilai Agama dan Kearifan Budaya Lokal Suku Bangsa Sasak dalam Pluralisme Kehidupan Masyarakat*. Mataram: Pokja Redam NTB, 2001.
- Bartholomew, John Ryan. *Alif Lam Mim Kearifan Masyarakat Sasak*. Diterjemahkan oleh Imron Rasyidi. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001.
- Bertrand, Jacques. *Nationalism and Ethnic Conflict in Indonesia*. New York: Cambridge University Press, 2004.
- Budiwanti, Erni. *Islam Sasak: Wetu Telu versus Waktu Lima*. Yogyakarta: LKiS, 2000.
- Colbran, Nicola. "Realities and Challenges in realising freedom of Religion or belief in Indonesia" *The International Journal of Human Rights*, Vol. 14, No. 5 (September 2010): 678 – 704.
- Coser, Lewis. *The Function of Social Conflict*. New York: Free Press, 1965.
- Dahrendorf, Ralf. *Class and Class Conflict in Industrial Society*. Stanford: Stanford University Press, 1959.
- Deutsch, Morton. *The Resolution of Conflict*. New Haven: Yale University Press, 1973.
- Faizah. "Dakwah Salafiyah di Lombok (Suatu Kajian Komunikasi antar Budaya)." Disertasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.
- Fisher, Simon, et al. *Mengelola Konflik Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak*. Diterjemahkan oleh S.N. Karikasari et al., Jakarta: The British Council Responding to Conflict, tth.
- Jamil, Muhsin, ed. *Mengelola Konflik Membangun Damai: Teori, Strategi dan Implementasi Resolusi Konflik*. Semarang: Walisongo Mediation Centre, 2007.
- Liliweri, Alo. *Prasangka dan Konflik Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*. Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Putnam, Robert D. *Making Democracy Work. Civic Tradition in Modern Italy*. Princeton: Princeton University Press, 1993.
- Ramsbotham, Oliver, Tom Woodhouse and Hugh Mial. *Contemporary Conflict Resolution. The Prevention, Management and Transformation of Deadly Conflicts*. Cambridge: Polity Press, 2006.

- Ridwan, Nurma Ali. "Landasan Keilmuan Kearifan Lokal", *Ibda'*, Vol. 5, No. 1, (Jan-Jun 2007): 27-38.
- Rothman, J. *From Confrontation to Cooperation: Resolving Ethnic and Regional Conflict*. Newbury Park, CA: Sage, 1992.
- Rozi, Syafuan et al. *Kekerasan Komunal: Anatomi dan Resolusi Konflik di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Said, Abdul Aziz, Nathan C. Funk, Ayse S. Kadayifci. *Peace and Conflict Resolution in Islam: Precept and Practice*. Lanham: University Press of America, 2001.
- Salmi, Ralph H., Cesar Adib Majul, George Kilpatrick Tanham. *Islam and Conflict Resolution: Theories and Practices*. Lanham: University Press of America, 1998.
- Sholahuddin, Marwan. "Mengenal Kearifan Lokal di Klepu Ponorogo: Praktik Hubungan Sosial Lintas Agama dan Mekanisme Pencegahan Konflik," dalam Irwan Abdullah, et al., ed. *Agama dan Kearifan Lokal dalam Tantangan Global*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Suprpto, Kadri dan Abdul Wahid. "Satu Leluhur Dua Agama" Laporan penelitian Lemlit IAIN Mataram tahun 2009.
- Sven Cederroth. *The Spell of The Ancestors and The Power of Mekkah, A Sasak Community on Lombok*. Goteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis, 1981.
- Syapruddin, H.L. "Nilai-Nilai Kearifan Lokal yang Berlaku pada Masyarakat Sasak Sebagai Pola Budaya", Makalah Disampaikan Pada *Seminar Budaya* di Taman Budaya Mataram.